

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih lebarnya kesenjangan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan tersebut terutama terjadi antara pedesaan dan perkotaan, antara pulau Jawa dan luar Jawa, antara pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan *hinterland* dan kawasan perbatasan, serta antar kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan arah utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*). Sementara tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata baik material maupun spritual sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilandasi oleh semangat kebersamaan dan kekeluargaan (Malik, 2015).

Disamping itu, kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016 ini menjadikan kawasan ASEAN menjadi tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Transformasi ini telah mengharuskan pelaku usaha termasuk industri kecil, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi melakukan berbagai peningkatan-peningkatan, atau perbaikan kualitas kebijakan dan atau strategi terhadap pengembangan kawasan potensial menjadi lebih siap dan matang menghadapi tantangan di era persaingan global tersebut (Malik, 2015).

Bahkan jauh sebelum itu, Naisbitt (1993) berani memastikan bahwa pada era global mendatang, semakin besar ekonomi dunia justru semakin kuatlah peran para pemain terkecilnya (*the bigger the world economy, the more powerful its smallest players*). Artinya, dalam era dimana informasi sangat memegang peranan, maka dengan berbekal informasi yang memadai ini tidak dibutuhkan struktur dan manajemen yang besar.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai salah satu bentuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia adalah sektor perekonomian yang keberadaannya sangat penting di Negara ini. Estimasi

pertumbuhan pelaku usaha tersebut mencerminkan bahwa setiap pertumbuhan 1% PDB akan menciptakan 42.797 pelaku usaha baru di Indonesia. Selain kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia, UKM dipandang sebagai sektor yang handal dalam menghadapi terpaan krisis ekonomi. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi beberapa tahun lalu, UKM masih tetap eksis sementara usaha besar banyak yang gulung tikar. Selain itu, UKM merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi negara maju/ berkembang. Meningkatnya produktivitas UKM, maka pertumbuhan UKM dapat ditingkatkan sehingga jumlah pengangguran di Indonesia dapat dikurangi menjadi 5% pada tahun 2012 (Astuti, dan Hana, 2014)

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia mendorong pemerintah untuk membangun struktur ekonomi dengan mempertimbangkan keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor ini telah terbukti memberikan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkembang di masyarakat. Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi. Di sisi lain, UKM juga menghadapi banyak masalah, yaitu keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan kurang cakupannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah hubungan dengan prospek bisnis yang kurang jelas dan visi perencanaan dan misi yang belum stabil. Pemberian informasi dan jaringan pasar, kemudahan akses pendanaan dan pendampingan serta peningkatan kapasitas teknologi informasi merupakan beberapa strategi peningkatan daya saing UMKM Indonesia. Oleh karena itu diperlukan sinergi semua pihak terutama antara pemerintah dan lembaga keuangan mikro. (Sudaryanto, 2011)

IKM telah tumbuh dan berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. Sejalan dengan itu pada tahun 2014 Kota Payakumbuh memiliki jumlah industri kecil menengah mencapai angka 1.337 unit usaha IKM informal dan 274 IKM formal dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.255 orang tenaga kerja IKM formal dan 4.573 orang tenaga kerja IKM informal. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2013, Kota Payakumbuh memiliki jumlah industri kecil menengah mencapai angka 1.239 unit usaha IKM informal dan 230 IKM formal dengan

penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.167 orang tenaga kerja IKM formal dan 4.257 orang tenaga kerja IKM informal (Dinas Koperasi UMKM dan Perindag 2014). Dari angka tersebut terlihat adanya pertumbuhan ekonomi dengan bertambahnya jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Dari perbandingan diatas, sektor IKM memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Payakumbuh pada khususnya. Untuk itu pemerintah daerah hendaknya selalu memperhatikan sektor ini karena berbagai alasan :

1. Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, dimana estimasi tenaga kerja yang terserap industri kecil-menengah sampai tahun 2010 adalah 99,40 juta orang atau 90 persen dari seluruh angkatan kerja. Dengan adanya perkembangan usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan.
2. Pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi IKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya IKM maka terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan, sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa.
3. Pemerataan dalam distribusi pendapatan. IKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki (*barrier to entry*). Pengembangan IKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan.

Dari ketiga alasan diatas maka munculah kawasan sentra makanan ringan sebagai jawaban atas tantangan yang semakin berat bagi pemerintah daerah di era persaingan yang semakin tajam seperti sekarang ini. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi modal bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan industri-industri, dengan penekanan pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan dan teknologi. Hal

tersebut sesuai dengan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh di kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh yang mengaplikasikan program *One Village One Product* (OVOP) atau satu desa satu produk adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik sesuai khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh yang berlokasi di Kelurahan Bulakan Balaikandi dan Kelurahan Payolansek tersebut merupakan salah satu kawasan yang diklasterisasi sebagai kawasan produksi makanan ringan yang muncul secara otodidak atas permintaan pasar dengan beberapa *outlet* saja, namun pada perjalanannya *outlet* tersebut terus bertambah seiring dengan penambahan jumlah IKM yang bermunculan untuk memenuhi permintaan pasar terhadap produk-produk unggulan mereka.

Berdasarkan observasi penulis terhadap lokasi objek penelitian untuk mendalami dan memverifikasi data hasil pencacahan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh tahun 2015, didapati banyak temuan bahwa kondisi yang ada sekarang pada kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kebanyakan produk makanan ringan pada kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh, belum memenuhi persyaratan sebagai produk yang bisa menembus pangsa pasar yang lebih luas dan lebih kompetitif. Kurangnya kemampuan pelaku usaha untuk membuat inovasi serta standarisasi produk yang menyesuaikan dengan tuntutan pasar, membuat produk makanan ringan di kawasan ini menjadi mudah tersaingi oleh produk sejenis yang lebih bermutu dan kaya inovasi.
2. Kurangnya infrastruktur penunjang sebagai kawasan sentra makanan ringan, yang hal tersebut berdampak langsung pada pemasaran dan mutu produk.

Dengan alasan seperti ini, maka sudah selayaknya apabila para pengusaha industri kecil pada kawasan sentra makanan ringan ini dibina, sehingga dapat mengembangkan usahanya. Dengan semua alasan tersebut menjadikan penulis

tertarik untuk mengupas lebih dalam tentang kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh pada tesis ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut ;

1. Bagaimana perkembangan industri kecil pada kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh?
2. Apa strategi yang diperlukan untuk mengembangkan industri kecil pada kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan diatas dan untuk mendapatkan suatu strategi yang tepat bagi pengembangan produk industri kecil pada kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis perkembangan industri kecil pada kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh.
2. Merumuskan strategi pengembangan industri kecil kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat positif bagi :

1. Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka :
 - a. Merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi industri kecil pada kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh secara tepat dan optimal;
 - b. Merumuskan penetapan program dan kegiatan yang tepat untuk meningkatkan kualitas produk makanan ringan industri kecil pada kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh.
2. Peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan informasi mengenai pengembangan industri kecil pada kawasan sentra makanan ringan Kota Payakumbuh.